

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era otonomi daerah saat ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota dari pemerintah pusat. Wewenang yang diberikan yaitu dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat dan menurut prakarsa sendiri dengan menyerap aspirasi masyarakatnya yang masih termasuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing.

Agar dapat melaksanakan pembangunan, maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber keuangan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi) pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam penyelenggaraan pembangunan tahapan yang paling awal dan

merupakan tahapan yang paling vital adalah tahapan perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu Negara. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan (partisipatif). Dengan kata lain, partisipasi masyarakat merupakan suatu kunci agar suatu pembangunan bisa sukses (Arief, 2006: 149-150). Tanpa melibatkan masyarakat pemerintah tidak dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, Pelaksanaan hingga *monitoring* dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Kegagalan pembangunan berperspektif modernisasi yang mengabaikan partisipasi negara miskin (pemerintah dan masyarakat) menjadi momentum yang berharga dalam tuntutan partisipasi Negara miskin, tentu saja termasuk didalamnya adalah masyarakat. Tuntutan ini semakin kuat seiring semakin kuatnya negara menekan kebebasan masyarakat. Post-modernisme dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap modernisme yang dianggap telah banyak memberikan dampak negatif dari pada positif bagi pembangunan di banyak negara berkembang. *Post-modernisme* bukan hanya bentuk perlawanan melainkan memberikan jawaban atau alternatif model yang dirasa lebih tepat.

Post-modernisme merupakan model pembangunan alternatif yang ditawarkan oleh kalangan ilmu sosial. *Post-modernisme* yang muncul pada tahun 1980-an ini dinyatakan sebagai model pembangunan alternatif karena memberikan penawaran konsep yang jauh berbeda dengan modernisme. Tekanan utama yang dibawa oleh *post-modernisme* terbagi dalam tiga aspek, yaitu agen pembangunan, metode dan tujuan pembangunan itu sendiri. Kelebihan dari paradigma pembangunan alternatif ini adalah sifatnya yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lokalitas yang ada, Artinya partisipasi masyarakat lokal menjadi pilihan utama dalam pendekatan ini (Widodo, 2008: 5). Turunan dari model alternatif ini semakin beragam apabila dihadapkan pada permasalahan lokalitas yang berbeda di tiap wilayah. Paradigma pembangunan alternatif dapat dikatakan sebagai sebuah proses transformasi sosial dengan sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembangunan manusia.

Di Indonesia selama pemerintahan orde baru (1966-1998), pembangunan yang dilaksanakan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari pusat sampai ke tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan desa dijalankan dengan sistem perencanaan yang sentralistik (terpusat). Campur tangan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat di daerah sangat dominan. Sistem perencanaan yang dianut adalah *top-down*, dimana semua program-program ditentukan oleh pemerintah pusat dan masyarakat hanya menerima saja (Nugroho, 2006: 5).

Kebijakan yang bersifat *top down* bisa diartikan secara umum bahwa kebijakan tersebut diturunkan dari pemerintah kepada masyarakat tanpa melibatkan secara langsung masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam hal ini masyarakat hanya dijadikan objek suatu kebijakan. pada akhirnya kebijakan yang dibuat seringkali tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan praktis yang dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa sebagai bagian dari program bersangkutan.

Pelaksanaan kebijakan yang bersifat *top down* tidak sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat khususnya pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep pemberdayaan masyarakat selama ini relatif tidak berjalan sama sekali karena yang berkembang adalah mekanisme kekuasaan dari pusat ke daerah. Hal ini berimbas pada ketidaktahuan masyarakat dan tumbuhnya sikap acuh tak acuh tentang pembangunan di wilayah mereka sendiri.

Setiap tahapan proses pembangunan ditentukan oleh negara, sementara partisipasi masyarakat tidak pernah diperhatikan. Akibat dari strategi perencanaan yang bersifat sentralistik tersebut berbagai masalah timbul ke hadapan masyarakat antara lain pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hasilnya tidak dapat mengangkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah menjelmakan dirinya sebagai penguasa yang dengan sendirinya bertindak secara otoriter (Abe, 2005: 91). Midgley (1986) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Konsep partisipasi dalam pembangunan di Indonesia mempunyai tantangan yang sangat besar. Model pembangunan yang telah kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya membangkitkan partisipasi masyarakat tersebut. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan.

Dalam rangka menghilangkan sentralisme pemerintah yang bermuara pada pola perencanaan yang bersifat terpusat, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam perkembangan selanjutnya diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan landasan yuridis ini memberikan perkembangan positif terhadap otonomi daerah di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi.

Azas desentralisasi dalam wacana otonomi daerah sangat penting. Karena dengannya ia memposisikan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama atas kebijakan penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dengan tetap berada di koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi diharapkan memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun daerahnya.

Pada hakekatnya desentralisasi diminati banyak orang karena didalamnya terkandung semangat demokrasi, yang ujungnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan (Arif, 2006:23). Dengan demikian harapan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan dalam rangka perubahan kondisi masyarakat dari suatu realita ke realita yang secara keseluruhan lebih baik, akan tercapai melalui konsep yang lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, sebagaimana falsafah yang dikandung oleh otonomi daerah tersebut yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan dan tanggung jawab.

Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakara tersebut. Sejak dikenalnya model perencanaan partisipatif, istilah *stakeholders* menjadi sangat luas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini. Perencanaan parsitipatif berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan program-program ditentukan oleh komitmen semua *stakeholders*, dan komitmen ini didapat dari sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan program tersebut.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu dioptimalkannya partisipasi masyarakat, yakni keikut sertaan masyarakat untuk mengakomodasikan

kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Perencanaan partisipatif diwujudkan melalui musyawarah perencanaan. Dalam musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pelaku pembangunan (*stakeholders*). Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara, masyarakat, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi nonpemerintah, dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi (Sumardi dan Evers, 1982) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah hak azasi, sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Kesempatan tersebut perlu diberikan karena tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai dengan yang mereka inginkan. Masyarakat sendiri yang akan merasakan dan menilai apakah pembangunan tersebut berhasil atau tidak. Maka agar tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam pembangunan.

Dalam masyarakat desa, perencanaan partisipatif merupakan sebuah instrumen yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif yang merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan tersebut diatas adalah tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa. Siapapun tak akan pungkiri, desa sebenarnya memiliki posisi yang strategis dalam gemuruh pembangunan dan politik pemerintahan di seluruh penjuru tanah air. Dari sisi penduduk, desa merupakan basis mayoritas penduduk, atau dalam kalimat lain, sebagian besar penduduk ini menetap di desa. Hal ini memungkinkan desa menjadi penyedia tenaga kerja terbesar dan di sisi lain menjadi basis massa yang kerap dimobilisasi demi kepentingan politik. Dari sisi sumber daya alam,

desa merupakan pemasok utama sumber bahan makanan produk kota-kota besar. Oleh karena itu, pada fase ini sudah selanjutnya perencanaan pembangunan di desa merupakan sebuah hasil proses musyawarah yang senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di desa benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat serta berjalan secara efektif dan efisien.

Di era desentralisasi dan keterbukaan ini, sudah saatnya masyarakat desa diberi kesempatan dan kewenangan luas dalam mengelola pembangunan yang ada di wilayahnya. Kewenangan tersebut baik yang dimulai sejak perancangan/penentuan aktivitas pelaksanaan hingga evaluasinya. Pendekatan semacam ini memungkinkan semua aktivitas pembangunan di aras desa sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang disarankan oleh masyarakat desa dan sesuai dengan konteks setempat (baik kondisi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan fisiknya).

Namun demikian, terkait dengan proses pembangunan desa, belum tentu secara utuh implementasi perencanaan partisipatif yang menjadi amanat baik yuridis maupun sosiologis dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum ditemukan bahwa selama ini partisipasi masyarakat desa relatif lemah, baik dalam proses pembuatan kebijakan lokal desa maupun untuk mengatur aktivitasnya sendiri. Berkaitan dengan ini Mahmuddin Muslim (2001) mengutip hasil survey *Public Integrity Index* menemukan bahwa permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada tertutupnya mekanisme politik bagi keterlibatan warga negara dalam menuntut akuntabilitas dan keterbukaan.

Jika kita melihat ke belakang, bahwa pola perencanaan berjenjang dari bawah ke atas (partisipatif) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa bisa didengar. Kita mengenal proses Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa), dilanjutkan dengan musrenbang ditingkat kecamatan, selanjutnya diikuti rapat

koordinasi pembangunan ditingkat kabupaten hingga propinsi. Keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan itu selesai ditingkat kecamatan, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah (desa) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari Musrenbangdes hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud. Musrenbangdes dalam perjalanannya selama ini belum dapat diandalkan sebagai wadah yang berperan penting di desa. Bila demikian adanya, maka realita ini tentu saja dapat menghambat jalannya implementasi perencanaan partisipatif. Padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa macetnya perencanaan partisipatif akan menghadirkan pola-pola pembangunan yang tidak aspiratif.

Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternative ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh khairuddin (1992:48), antara lain :

1. Perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut)
2. Dari segi bidang yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain : industrialisasi, agraria (pertanian), pendidikan , kesehatan, pertanian, pertahanan dan keamanan.

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Pertanian juga menjadi landasan perekonomian dari suatu negara. Ia menjadi sumber pangan, sandang dan papan yang bermutu dan berkesinambungan bagi masyarakat suatu bangsa serta sebagai sumber bahan baku bagi industri lainnya.

Ilmu Ekonomi Pertanian adalah bagian ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena serta persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian baik mikro maupun makro. Dalam ruang lingkup ini proses ekonomi berlangsung pada sektor pertanian. Aplikasi ilmu ekonomi di sektor pertanian dalam kompleksitas perekonomian pasar tentunya melibatkan beragam aktivitas baik di level mikro maupun makro ekonomi. Pada level mikro pakar ekonomi produksi pertanian umumnya memberikan kontribusi dengan meneliti permintaan input dan respon suplai. Bidang kajian pakar pemasaran pertanian terfokus pada rantai pemasaran bahan pangan dan serat dan penetapan harga pada masing-masing tahap. Pakar pembiayaan ekonomi pertanian mempelajari isu-isu yang erat kaitannya dengan pembiayaan bisnis dan suplai modal pada perusahaan agrobisnis. Sedangkan pakar ekonomi sumberdaya pertanian berperan pada bidang kajian tentang pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam. Pakar ekonomi lainnya mempelajari penyusunan program pemerintah atas suatu komoditi dan dampak penetapan kebijakan pemerintah baik terhadap konsumen maupun produsen produk pertanian. Proses tersebut merupakan proses jual beli antara produsen maupun konsumen ataupun kegiatan perekonomian lainnya.

Tidak diragukan lagi, bahwa di antara semua kegiatan usaha yang wajib diperhatikan adalah kegiatan pemasaran, karena tanpa adanya kegiatan pemasaran tidak akan terjadi pemindahan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, yang berarti tidak akan terjadi proses pertukaran. Pemasaran berperan sebagai jembatan utama, penghubung antara

produsen dengan konsumen. Tidak ada gunanya barang yang bermutu baik dan harga memadai tetapi konsumen sulit untuk memperoleh barang tersebut. Perbaikan pemasaran pada dasarnya adalah upaya perbaikan posisi tawar produsen terhadap pedagang, pedagang terhadap konsumen, dan sebaliknya melalui perbaikan daya saing komoditas pertanian sehingga semua pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, keberhasilan dalam perbaikan pemasaran akan memberikan dampak multifungsi dalam pembangunan pertanian seperti menjadi penghela bagi peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian, memperluas kesempatan kerja dan menjadi kunci utama upaya peningkatan pendapatan petani. Dengan kata lain perbaikan pemasaran merupakan ujung tombak revitalisasi sektor pertanian saat ini.

Pasar merupakan salah satu sarana kegiatan perekonomian. Pasar sebagai tempat para pedagang memasarkan barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Sejak zaman penjajahan kegiatan pasar beserta pasar pedagangnya berkembang secara alamiah. Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli.

Dalam peningkatan kinerja operasional pasar tradisional, pengelola pasar harus menentukan pilihan-pilihan untuk mencapai pengelolaan pasar yang efisien, seperti pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji secara harian atau dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Efektivitas manajemen pengelolaan pasar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan profesionalitas pengelolaan pasar, dimana pengelolaan pasar yang efektif

dapat menghasilkan pasar yang efisien dengan input yang ada dapat menghasilkan output yang optimal. Otonomi pengelolaan pasar juga sangat dibutuhkan, dengan otonomi yang lebih besar, pengelola pasar (unit pasar) mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, unit pasar lebih berdaya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat (pengunjung) dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen dilakukan secara otonomi mengandung arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah yang muncul di pasar dengan solusi yang terbaik (Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pasar di Kabupaten/ Kota, 2010).

Pasar desa adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa (PD). Pasar desa (tradisional) merupakan sebuah aset ekonomi dan budaya di tingkat desa, tetapi seiring perkembangan pasar modern yang begitu pesat lambat laun mengancam keberadaan pasar tradisional. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Lamongan.

Pasar memiliki kontribusi yang besar bagi kehidupan masyarakat pedesaan, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang sosial dan budaya. Pasar desa pada masyarakat pedesaan dapat diartikan sebagai pintu gerbang yang menghubungkan masyarakat tersebut dengan dunia luar. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mempunyai peranan dalam perubahan-perubahan kebudayaan yang berlangsung dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pasar desa harus dilindungi dan dikembangkan sebagai tonggak ekonomi pedesaan serta diperlukan suatu upaya pemberdayaan terhadap pasar tradisional agar terjaga eksistensi pasar tradisional untuk tetap mampu bersaing dengan pasar modern serta dapat terus memberikan kontribusi bagi desa maupun Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan.

Pasar tradisional desa berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan. Pasar tradisional desa Sugio sangat memberikan wadah bagi masyarakat untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dan semakin menjalin hubungan sosial antar masyarakat. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Hubungan sosial merupakan hubungan yang terwujud antara individu dan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok sebagai akibat dari hasil interaksi sesama mereka (Alishahbana, 2010: 1). Proses hal ini pun akhirnya membuat suatu keakraban dan suatu hubungan yang kuat antar penjual dan pembeli yang pada akhirnya pasar tradisional desa Sugio bukan hanya menjadi tempat media jual beli tetapi juga menjadi sarana sosialisasi dan membangun hubungan sosial masyarakat. Pasar mengatur kehidupan sosial, termasuk ekonomi secara otomatis. Karena pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa hasil yang terbaik, tidak hanya mereka sebagai pribadi tetapi juga kepada masyarakat sebagai keseluruhan (Damsar, 2009: 110).

Pasar tradisional desa Sugio dibangun pada tahun 1947an, terletak di wilayah RT 2 di Desa Sugio yang memiliki luas sekitar 5600m², dengan jumlah pedagang sebanyak 301 pedagang resmi yang memiliki kios dan 63 pedagang liar, pasar Desa Sugio memiliki kios layang yang mampu menampung sebanyak 25 unit dengan sistim sewa harian, biasanya hanya ramai saat hari pekan dan hari libur saja, dan swadaya 312 unit. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sisi luar bangunan pasar merupakan salah satu masalah yang dihadapi pasar tradisional Desa Sugio. Kehadiran PKL menambah kesan kumuh dan semrawut yang biasanya mewarnai pasar tradisional dan mengancam keberadaan pedagang yang memiliki kios di pasar tradisional Desa Sugio. Menjamurnya PKL di sekitar pasar tradisional berkaitan erat dengan pengelolaan pasar, oleh karena itu, upaya mengatasi dampak kehadiran PKL di

pasar tradisional tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan pasar yang baik. Para PKL yang menggelar dagangan di depan pasar sampai bahu jalan sering kali menimbulkan kemacetan lalu lintas dan turut menimbulkan ketidaknyamanan berbelanja di pasar tradisional. Sehingga banyak menuai protes dari para pedagang yang memiliki kios serta ketidaknyamanan masyarakat yang berkunjung ke Pasar Desa Sugio.

Para pemilik kios merasa risih dengan banyaknya para pedagang liar yang berjualan di tepi pintu jalan masuk menuju pasar yang mana membuat jalan masuk menuju pasar akhirnya menjadi dipadati oleh para pedagang di sisi jalan. Tidak sedikit para pedagang liar menuai protes dari warga masyarakat karena jalan masuk menuju pasar akhirnya dinilai semrawut dan tidak beraturan. Banyaknya para pedagang liar yang juga bertujuan untuk meraih peruntungan guna mencukupi perekonomian mereka, dengan begitu para pemilik kiospun gerah dengan ulah para pedagang liar yang semakin bertambah, yang kemudian para pemilik kios bersepakat untuk mengadakan hal tersebut kepada Kepala Pengelola Pasar Desa Sugio agar diberikan solusi yang baik untuk para pedagang liar. Tidak sedikit pula dari para pedagang pemilik kios mengadu kepada pengelola pasar agar menambahkan kios untuk kebutuhan mereka.

Pengaduan mereka dirasa sia-sia, karena kurang lebih selama 3 tahun tidak ada kejelasan dari Kepala Pengelola Pasar untuk memberikan solusi. Akhirnya para pedagang sepakat mengadakan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa agar dapat teratasi. Berselang 2 bulan Kepala Desa akhirnya memanggil Kepala Pengelola Pasar Desa Sugio untuk membicarakan permasalahan tersebut.

Dengan berjalannya waktu Kepala Pengelola Pasar Desa beserta staffnya mengundang sebagian perwakilan dari para pedagang, baik yang memiliki kios maupun pedagang liar untuk mengadakan musyawarah guna penyelesaian masalah pedagang liar yang

memadati jalan masuk menuju pasar. Pada saat bermusyawarah sempat terjadi kericuhan saling beradu mulut antara pedagang yang memiliki kios dengan pedagang liar, dikarenakan perbedaan kemauan yang mana para pedagang yang memiliki kios mendesak Kepala Pengelola pasar beserta staff agar menambahkan kios baru untuk para pedagang liar supaya jalan masuk menuju pasar tidak semrawut sehingga lebih menarik minat warga yang hendak ke pasar tersebut. Akan tetapi para pedagang liar tidak terima dengan hal itu, karena mereka merasa tidak mampu membeli kios dengan harga dan pendapatan mereka yang tidak sebanding. Kericuhan tersebut akhirnya diketahui oleh sebagian warga masyarakat desa setempat yang akhirnya membuat sebagian warga masyarakat desa setempat yang mengetahui tersebut turut berpartisipasi dalam mengikuti musyawarah selanjutnya karena mereka ingin turut andil dalam memberikan solusi. Musyawarah selanjutnya Kepala Pengelola pasar akhirnya mengundang sebagian masyarakat serta Kepala Desa, dan Kepala BPD. Dari kesimpulan musyawarah tersebut, sebagian warga masyarakat yang turut berpartisipasi sepakat dengan ide para pemilik kios, dimana para pedagang liar diharuskan memiliki kios agar jalan masuk menuju pasar tidak lagi semrawut. Akan tetapi diberikan keringanan dalam bentuk kurun waktu kredit lebih lama, sehingga tidak menjadi beban yang berat untuk pedagang yang kurang mampu.

Dengan begitu, pendapat warga masyarakat bertujuan agar lebih menarik minat warga yang berdatangan ke pasar desa, semakin banyak warga yang berdatangan ke pasar desa, semakin banyak pula kesempatan peruntungan yang diperoleh nantinya. Hal tersebut tidak semata-mata karena alasan mereka membela para pemilik kios, akan tetapi warga masyarakat mempunyai pengalaman yang cukup besar jika di padukan dengan pertama kali berdirinya pasar. Pasar Desa Sugio yang dulunya hanya segelintir pedagang dengan bangunan seadanya dan terkesan becek, kumuh dan lain sebagainya membuat warga yang berdatangan tidak nyaman. Dan dengan berjalannya waktu bangunan sedikit demi sedikit

diperbarui dengan begitu warga masyarakat banyak kembali yang berdatangan ke Pasar Desa Sugio. Sehingga warga masyarakat memberikan masukan tersebut dengan harapan agar warga yang berdatangan lebih menarik minat warga tidak hanya warga desa setempat akan tetapi dari luar desa yang lebih luas.

Pasar tradisional Desa Sugio merupakan satu dari 27 pasar tradisional yang ada di kabupaten Lamongan. Kios yang ada pada pasar menggunakan sistem beli, dimana kios di jual kepada pedagang dan di bayar dengan sistem kredit. Untuk harga satu lods berkisar 10 – 20 juta rupiah. Sementara kios yang berukuran 2 x 1,5m bisa mencapai Rp.40 juta dan untuk ukuran 2 x 2m dipatok dengan harga Rp. 60 juta. Dengan jangka waktu dalam mencicilnya yang kurang lebih 7 tahun.

Dengan adanya pasar di Desa Sugio maka desa ini menjadi ramai karena banyak dikunjungi baik pedagang maupun pembeli dari desa atau daerah lain. Dan hal ini juga berpengaruh pada perkembangan sosial masyarakatnya. Keberadaan pasar ini juga menunjang kesejahteraan masyarakatnya karena banyak membuka peluang usaha di desa tersebut. Letak Pasar Desa Sugio yang berada di tengah pemukiman membuat masyarakat yang ada disana pun bisa memanfaatkannya.

Keberadaan pasar di desa Sugio pastilah sangat berpengaruh pada perekonomian di desa tersebut. Banyak peluang usaha terutama untuk warga disekitar pasar. Banyak usaha yang berdiri disekitar pasar, ada toko, warung, apotek, bengkel, dan bahkan minimarket/swalayan milik warga setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pasar sangat menunjang perekonomian desa.

Terkait dengan disahkannya Perda No.6 Tahun 2012 tentang Penataan pasar tradisional, pusat Perbelanjaan di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, bagi Pemerintah

Daerah (PD), pasar sendiri merupakan angin segar bagi keberlangsungan pasar tradisional di Kota Lamongan. Lebih jauh lagi, di pasar tradisional merupakan tempat berbagai macam pekerjaan dan aktifitas yang menyokong ribuan orang yang hidup disana. Perda No.6 tahun 2012 mengatakan bahwa penataan adalah segala upaya penataan daerah dalam menata pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

Dengan adanya pasar tradisional Desa Sugio banyak orang luar desa yang masuk atau datang di Desa Sugio. Kemudian mereka pun berbaur dengan masyarakat desa setempat. Sehingga informasi-informasi dari luar cepat masuk tersebar di Desa Sugio terutama wilayah sekitar pasar. Hal ini juga mempengaruhi budaya yang berkembang di desa karena banyak pengaruh dari luar yang masuk.

Masyarakat di sekitar menganggap bahwa keberadaan Pasar tradisional Desa Sugio sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan primer mereka. Pasar tradisional Desa Sugio pun dapat dijadikan salah satu alternatif bagi masyarakat Kelurahan Desa Sugio guna memenuhi kebutuhan mereka. Ramainya pengunjung yang berbelanja di Pasar Desa Sugio akhirnya membuat semakin banyak minat warga yang ingin berjualan di Pasar Desa Sugio. Mereka yang ingin berjualan mengajukan permohonan kepada kepala desa agar menambahkan kios di pasar tradisional Desa Sugio.

Masyarakat Desa Sugio turut berpartisipasi penuh terhadap pembangunan pasar Desa tersebut dengan cara warga sering sekali mengadakan rapat agar pembangunan segera direalisasikan. Karena Pandangan masyarakat Desa Sugio, pasar juga merupakan sebagai salah satu tempat rekreasi yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang dapat dijumpai dipasar seperti:

melihat barang-barang yang sedang *trend* (baru), melihat atraksi lokal, menghibur diri dengan keunikan yang ada pada pasar tersebut dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan mengapa masyarakat pada umumnya lebih memilih menghabiskan waktu senggang (libur) untuk pergi ke pasar. Sehingga dengan begitu Desa Sugio juga akan mengalami kemajuan pesat dalam hal perekonomian.

Tujuan dibangunnya Pasar Desa Sugio adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di Kelurahan desa Sugio dan sekitarnya, yang dimana biasanya warga sebelum adanya pasar tersebut harus berbelanja ke pasar tradisional lain yang jaraknya sangat jauh. Dengan adanya Pasar Desa Sugio, masyarakat disekitar dimudahkan, karena tidak perlu berbelanja jauh-jauh lagi dan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga dan tentunya akan membuat daerah tersebut semakin maju dan berkembang. Karena seiring dengan perkembangan zaman peranan pasar menjadi sangat penting karena melalui pasar kebutuhan seseorang bisa terpenuhi dengan cepat. Perkembangan pasar akan selalu sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Jalan raya di sekitar pasar tradisional desa Sugio dinilai salah satu titik kemacetan arus kendaraan dari arah desa Sugio ke desa Balunggesing atau dari arah sebaliknya, kemacetan lalu lintas di kawasan ini disebabkan karena banyak warga yang keluar masuk pasar diperparah lagi dengan meningkatnya volume kendaraan roda empat dan sepeda motor yang melewati pasar. Selain itu, setiap hari pading dan hari libur selalu ramai dipadati pedagang dan pembeli karena kebersamaan dengan hari pekan pasar tradisional Desa Sugio.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul: Partisipasi Masyarakat Dalam

Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi pada Partisipasi Masyarakat Desa Sugio Dalam Pembangunan Perluasan Pasar Desa di Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *“Bagaimana partisipasi masyarakat desa Sugio dalam mewujudkan pembangunan perluasan pasar tradisional di Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan?”*

I.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan rumusan permasalahan yang diajukan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan perluasan pasar Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis. Memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya partisipasi perencanaan partisipatif, serta memberikan masukan bagi masyarakat desa khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan partisipasinya terhadap desa.
2. Secara Akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung bagi kepustakaan departemen ilmu administrasi negara dan bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

I.5 Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya (Sugiyono, 2004: 55). Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah sebagai berikut:

I.5.1 Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing yaitu *participation*, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa

mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya atau dengan kata lain yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan

pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam penelitian ini diartikan turut serta masyarakat dalam pembangunan perluasan Pasar Desa Sugio.

Istilah masyarakat berasal dari kata musyarak yang berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah dan identitas. Dari berbagai definisi yang ada, dapat dicatat beberapa unsur penting masyarakat sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan berapa jumlah manusia yang hidup bersama itu. Sedikitnya ada dua orang.
2. Kehidupan bersama tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ungkapan “cukup lama” bukanlah sebuah ukuran angka. Melainkan, hendak menunjukkan bahwa kehidupan bersama tersebut tidak bersifat insidental dan spontan, namun dilakukan untuk jangka panjang.
3. Adanya kesadaran di antara anggota bahwa mereka merupakan satu kehidupan bersama. Dengan demikian, ada solidaritas di antara warga dan kelompok manusia tersebut.

4. Kelompok manusia tersebut merupakan sebuah kehidupan bersama. Maksudnya, mereka memiliki budaya bersama yang membuat anggota kelompok saling terikat satu sama lain.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, dapat dirumuskan bahwa masyarakat perlu berperan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri. Partisipasi sesungguhnya merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan prasana pihak lain, juga merupakan suatu perhatian mendalam mengenai perubahan yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat. partisipasi juga merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang diberikan oleh pihak lain untuk suatu kegiatan.

Partisipasi masyarakat dapat ditumbuhkembangkan melalui wadah partisipasi, antara lain melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau melalui wadah-wadah partisipasi masyarakat lainnya yang ada di Kelurahan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk penyusunan rencana pembangunan, penggerakan swadaya dan kegotong royongan masyarakat dan dalam pelaksanaan serta pengendalian atau pengawasan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

I.5.2 Perencanaan Pembangunan Partisipatif

I.5.2.1 Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang dikerjakan. Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992: 47)
2. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Wrihatnolo dan Nugroho, 2006: 40)
3. Perencanaan sebagai Analisis Kebijakan (*Planning as Policy Analysis*) yaitu, merupakan tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi yang disebut sibernetika (Aristo, 2004:73)

Dari pengertian diatas dapat diuraikan beberapa komponen penting yakni tujuan apa yang hendak dicapai, kegiatan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu (kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk masa depan. Namun demikian, meskipun mengandung pengertian masa depan, bukanlah hipotesis yang dibuat tanpa perhitungan. Hipotesis dalam perencanaan selalu didasarkan atas data-data dan perkiraan yang telah tercapai, dan juga memperhitungkan sumber daya yang ada dan akan dapat dihimpun. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya.

Seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan-kegiatan baru, atau alokasi keuangan untuk kegiatan-kegiatan lama., tanpa menilai kembali kualitasnya secara kritis. Acapkali lebih banyak sumbangan dapat di berikan kepada pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan dari pada memulai yang baru. Ketaren (2006: 70), telah merumuskan unsur-unsur dan tipe-tipe perencanaan sebagai berikut:

- a) Unsur-unsur perencanaan, diantaranya:
1. Sifat rencana itu sendiri sebagai dasar pelaksanaannya sudah mengandung ciri-ciri yang berorientasi pada pelaksanaan, dalam arti memungkinkan untuk pelaksanaannya dan perencanaan tersebut sudah diperhatikan kapasitas administratif dalam pelaksanaannya.
 2. Proses-proses perencanaan tetap mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas, oleh karena itu harus dilakukan terus menerus reformulasi rencana dan reimplementasi dalam pelaksanaannya.
 3. Mengusahakan perencanaan dapat seoprasional mungkin.
 4. Adanya sistem pengendalian pelaksana pembangunan yang mengusahakan keserasian antar pelaksana dan rencana.
 5. Diperlukan adanya sistem pelaporan dan evaluasi dalam proses perencanaan.

Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja dipandang sesuai tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya.

I.5.2.2 Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Dalam hal pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, serta tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah pertumbuhan. (Solihin 2006:11), mengungkapkan tiga tahapan perencanaan pembangunan yaitu:

1. Perumusan dan penentuan tujuan
2. Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia, dan
3. Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama.

Dari ketiga tahapan perencanaan tersebut dapat didefinisikan perencanaan pembangunan wilayah atau daerah sebagai berikut: suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (*actor*) baik umum (*public*) atau pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat *stakeholder* lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Definisi SPPN di atas secara tegas menyebutkan bahwa dalam perencanaan diisyaratkan harus memiliki unsur keterlibatan penyelenggara negara dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisipasi aktif masyarakat tersebut lebih dikenal dengan istilah perencanaan pembangunan partisipatif atau bisa dikenal dengan istilah perencanaan partisipatif. Partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan masyarakat lokal (Adisasmita, 2006:38). Atau dengan kata lain pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan

Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas manusia. Dalam penelitian ini pembangunan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian untuk lebih baik lagi. Ndraha (1990: 104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (*felt need*), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban(*response*), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*).

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Menurut Abe (2005:47) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan

mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Konsep perencanaan pembangunan partisipatif, perencanaan dengan pendekatan partisipatif atau bisa disebut sebagai *participatory planning*, jika dikaitkan dengan teori menurut (Sinaga, 2005: 30), sebenarnya merupakan suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penetapan program-program pembangunan. Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan *stakeholder* terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana. Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari *good governance* maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif.

Proses pembangunan tersebut perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui “peran pemerintah bersama masyarakat” melalui partisipasi dengan memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional/globalisasi. Konsep perencanaan yang bersifat *top-down* yang telah menciptakan kegagalan pembangunan tersebut harus diganti dengan konsep perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom up planning*) dengan partisipasi aktif dari masyarakat (Adisasmita, 2006:35). Ada beberapa keuntungan yang dapat kita harapkan dari adanya suatu penerapan pendekatan partisipatif, yakni:

1. Masyarakat akan lebih memiliki tanggungjawab yang lebih tinggi terutama dalam hal memelihara dan menjaga apa yang telah dibangun bersama.
2. Semangat akan pembangunan akan lebih memaknai proses pembangunan itu sendiri secara holistik sebagai konsekuensi adanya kebersamaan di dalam membangun, baik dalam hal merencanakan maupun mengambil keputusan.
3. Ketidakefisienan seperti adanya program yang tumpang tindih di dalam proses pembangunan dapat dihindari sehingga penghematan pada penganggaran pembangunanpun dapat dilakukan.

Prinsip perencanaan partisipatif pada dasarnya sama dengan prinsip *good governance*, yang mana prinsip *good governance* tersebut menekankan pada pengakuan akan kekuasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. UNDP (*United Nation Development Program*) sebagai lembaga dunia yang bergerak dalam bidang pembangunan, mengungkapkan karakteristik perencanaan partisipatif (Osborne, 2005:17) sebagai berikut:

1. Partisipasi setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan yang legitimate mewakili kepentingannya.
2. Peraturan hukum
3. Keterbukaan
4. Ketanggapan
5. Kesepakatan bersama
6. Bertanggungjawab
7. Keadilan
8. Efektif dan efisien

Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses perencanaan pembangunan yang baik dan benar (Abe, 2005:91). Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat agar dapat berdaya, sangat dibutuhkan kebebasan, kesempatan dan ruang gerak yang tersusun dalam empat tingkatan, sebagaimana yang dikutip dalam (Arif, 2006: 150-151), yaitu :

1. Partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pembangunan.
2. Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-program infrastruktur fisik daerah. Oleh sebab itu, kepentingan dan saran-saran mereka harus di dengar oleh mereka yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah.
3. Partisipasi yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen perlu memperoleh stimulan dan dukungan sebagai reaksi terhadap birokrasi pembangunan yang kurang memiliki kepekaan teradap kepentingan masyarakat.
4. Partisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial dan dalam rangka tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Pada dasarnya partisipasi itu dilandasi dengan adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang tersebut saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan: (1) terciptanya suasana yang bebas dan demokratis, dan (2) terbinanya kebersamaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut

sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga itu dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang (7) memberi kemudahan untuk evaluasi (8) program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga yang tersedia (Koentjaraningrat dan Budhisantoso, 1984 : 124-125).

Perencanaan partisipatif yakni serangkaian proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta dengan menyertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom up approach*).

I.6 Definisi Konsep

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam penelitian ini diartikan turut serta masyarakat dalam pembangunan perluasan pasar desa sugio.

Masyarakat yaitu sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Dalam penelitian ini diartikan bahwa turut serta berpartisipasi agar dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan partisipatif yakni sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992: 47)

Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan kualitas manusia. Dalam

penelitian ini pembangunan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian untuk lebih baik lagi.

Perencanaan pembangunan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

3. Perencanaan Partisipatif

Menurut Abe (2005:47) perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat akan mempunyai dampak yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu: terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah keterlibatan individu-individu anggota masyarakat untuk bertanggung jawab baik mental maupun emosi terhadap tujuan pembangunan desa. Dalam keterlibatannya, masyarakat harus memberikan dukungan semangat berupa bentuk partisipasi yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan fase pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan dan penilaian).

I.7 Rincian Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan metode survei, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan yakni dengan observasi dan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada informan, yakni kepada Kepala Pengelola Pasar Desa Sugio, masyarakat Desa Sugio sebanyak 25 partisipan serta Pedagang Pasar Desa Sugio sebanyak 10 partisipan. Dari jumlah partisipan sebanyak 36 partisipan diambil atas pertimbangan dari Kepala Pengelola Pasar Desa Sugio, karena dirasa merekalah yang faham terhadap permasalahan dan yang aktif pada saat mengikuti musyawarah. Adapun pertanyaan yang akan diajukan yakni meliputi:

1.7.1 Partisipasi Masyarakat

- Pemahaman masyarakat terhadap perencanaan partisipatif dalam pembangunan.
- Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

1.7.2 Perencanaan Pembangunan

- Keberadaan Pedoman Terhadap Optimalisasi dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Kesesuaian Rencana Kerja Pembangunan Perluasan Pasar Desa Sugio Terhadap Kebutuhan Masyarakat

1.7.3 Perencanaan Partisipatif

- Hambatan dalam Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif Terhadap Kesesuaian Jumlah Kios pada Pembangunan Perluasan Pasar Desa Sugio

Data-data yang dijaring, dikodifikasikan dan dideskripsikan adalah bersumber dari jawaban para informan dan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dokumen resmi dan literatur-literatur yang lain, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, seperti : buku, artikel, makalah, internet, dan lain - lain. Dokumentasi yang berupa tulisan (kuesioner) bagi peneliti dapat digunakan untuk diproses (melalui pencatatan, pengetikan, atau alat tulis)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Narbuco dan Ahmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian deskriptif juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, penelitian deskriptif juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Danim (2002:41) memberikan beberapa ciri-ciri dominan dari penelitian deskriptif yaitu:

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antar variabel, menguji hipotesis atau membuat ramalan.

2. Dilakukan secara survei. Oleh karena itu penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian survei. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat histories dan eksperimental.
3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung. Dan
5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa penelitian ini juga ditempuh berdasarkan tujuan untuk memahami bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan terutama dalam meningkatkan partisipasi warga pada pelaksanaan pembangunan perluasan Pasar Desa Sugio.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih yakni di Pasar Desa Sugio, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Dengan alasan pasar Desa Sugio adalah pasar terbesar ke 3 yang ada di Kabupaten Lamongan setelah Pasar Lamongan dan Pasar Babat. Yang mana Pasar Desa Sugio semakin tahun semakin berkembang, baik dari segi pembeli yang berdatangan, jumlah pedagang yang semakin bertambah, maupun dari segi bangunannya yang semakin layak. Akan tetapi, yang terjadi pada akhir-akhir ini Pasar Desa Sugio banyak terdapat pedagang liar yang berjualan di bahu jalan masuk pasar. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pedagang resmi yang memiliki kios maupun pembeli yang berdatangan ke Pasar Desa Sugio tersebut.

Dengan begitu pasar pada saat akhir-akhir ini terlihat semrawut sehingga seringkali menuai protes baik dari kalangan pedagang resmi yang memiliki kios maupun dari warga yang berdatangan ke Pasar Desa Sugio tersebut. Semrawutnya bahu jalan sering kali membuat kemacetan sehingga pedagang resmi semakin merasa risih dengan pedagang liar yang berjualan di tepi jalan masuk pasar. Para pedagang resmi bersepakat untuk menuntut para pedagang liar kepada Kepala pengelola pasar agar Kepala pengelola pasar menambahkan kios resmi bagi pedagang liar dengan sistem yang sama, yakni membeli dengan sistem kredit. Akan tetapi para pedagang liar tidak terima akan hal tersebut, karena dirasa pendapatan mereka sangat minim dan tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan seperti yang sudah sebelumnya.

Kericuhan tersebut memicu partisipasi warga setempat turut serta dalam bermusyawarah dengan tujuan bisa menjadi titik tengah dalam permasalahan tersebut. Yakni mengusulkan keringanan harga dengan jangka kredit yang lebih lama sehingga tidak memberatkan satu pihak. Dan akhirnya pedagang liarpun akhirnya mensepakati hal tersebut. Dari alasan di atas, maka dalam penelitian ini tertarik untuk meneliti dan dengan mengukur partisipasi masyarakat dalam perluasan pembangunan pasar yang saat ini sedang berjalan.

1.8.3 Teknik Penentuan Informan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif tidak dapat ditetapkan dengan rumus seperti dalam penelitian kuantitatif. Hal ini dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam penelitian teknik yang digunakan yakni menggunakan informan kunci (*key informan*) dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan

permasalahan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi, 1987:157).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah : Kepala pengelola pasar yang dianggap mengetahui dan faham akan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi informan biasa adalah masyarakat Desa Sugio sebanyak 25 partisipan dan 10 partisipan dari para pedagang pasar tradisional desa sugio.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena hakikat dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya diinterpretasikan dan di analisa untuk menjawab rumusan permasalahan yang diajukan. Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Menurut Lofland (1984) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya data yang diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh melalui: Kuesioner (angket), adalah suatu daftar yang berisikan serangkaian pertanyaan

mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan, serta informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh penulis.

Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan serangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan, serta informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan oleh penulis.

2. Observasi.

Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian

ini menggunakan observasi partisipasi pasip yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik tersebut di atas, kemudian dilakukan teknik analisis data. Analisis data ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami sebagai upaya menemukan jawaban atas permasalahan penelitian.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy, 2006:248).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia yang diperoleh melalui angket atau kuesioner. Langkah selanjutnya adalah disusun dan dikategorikan dalam bentuk yang mudah dipahami yang pada intinya adalah upaya mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: (a) reduksi data; (b) display data; dan (c) penarikan kesimpulan/ verifikasi.

- Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Reduksi data diartikan juga sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak saat memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan penemuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus). Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data dilapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.

- Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) bahwa penyajian data dimaksudkan untuk pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah data dalam bentuk teks walaupun tidak praktis namun akan lebih baik apabila didukung dengan data yang disajikan dalam tabel.

- Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi.

